



BAB IV PENUTUP

BAB IV berisi :

Simpulan umum atas
capaian kinerja
Pemerintah Provinsi Jambi

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi disusun berdasarkan kebijakan umum tahun anggaran 2014, serta perjanjian kinerja tahun 2014 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka mewujudkan good governance.

Laporan Kinerja (LKj) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Pemerintah Provinsi Jambi juga menjadi makna strategis sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam kaitannya dengan kedudukan sebagai Pemerintah Provinsi Jambi, LKj juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban tugas dan fungsi baik sebagai daerah otonom maupun sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2014, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD. Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2014 merupakan tahun ke-IV (empat) dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2010-2015. Keberhasilan yang dicapai semata-mata adalah berkat kerjasama dan partisipasi semua komponen pemerintah daerah dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, sehingga terget Jambi EMAS 2015 dapat terwujud. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Secara umum, terlihat bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2014 rata-rata sangat baik, karena 25 indikator memenuhi kriteria sangat baik, 1 indikator memenuhi kriteria tinggi, dan 4 indikator memenuhi kriteria sedang. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa upaya maksimal telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah.

Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2014, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. Pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk sistem akuntabilitas kinerja yang dikenal sebagai e-sakip adalah bagian dari upaya penyelesaian masalah-masalah pembangunan melalui intervensi program/ kegiatan yang berbasis data dan terfokus. Begitu juga pengembangan sistem pengendalian berbasis teknologi informasi melalui link laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan (lppk).

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi ke depan. *Pertama*, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan masih tingginya angka rumah tangga sangat miskin, laju inflasi yang cenderung naik, proporsi rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak tergolong



rendah, hingga nilai ekspor non migas Provinsi Jambi yang masih rendah. Peran Pemerintah Provinsi Jambi diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan. Ini juga mencakup pentingnya perlindungan dan peningkatan inklusi sosial bagi kelompok-kelompok marjinal yang masih menghadapi ketimpangan akses dan manfaat pembangunan.

Kedua, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi, daerah yang berbatasan dengan Provinsi Jambi maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Beberapa sasaran seperti masih tingginya angka rumah tangga sangat miskin sebagai akibat dari bertambahnya jumlah penduduk tanpa diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, laju inflasi yang cenderung naik, hingga nilai ekspor non migas Provinsi Jambi yang masih rendah menunjukkan pentingnya kontribusi dan koordinasi dengan dunia usaha dan juga masyarakat. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas, kreatifitas, inovasi, dan komitmen yang kuat dalam upaya mencapai kinerja yang akuntabel sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.